

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

TPU/ KOMPETENSI DASAR

SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI PESERTA MAMPU MENJELASKAN PENGERTIAN, KONSEP POKOK, METODE ANALISIS & APLIKASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA PERAN INFORMASI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK.

TPK/ INDIKATOR KEBERHASILAN

SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI PESERTA MAMPU MENJELASKAN:

- PENGERTIAN, JENIS-JENIS & TINGKAT-TINGKAT K.P.
- SISTEM, PROSES, & SIKLUS K.P.
- PERAN INFORMASI DALAM PEMBENTUKAN K.P.
- AGENDA SETTING
- ANALISIS K.P. SERTA:
- MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK.

PENGERTIAN JENIS & TINGKATAN KEBIJAKAN PUBLIK.

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

THOMAS R. DYE:

PUBLIC POLICY IS WHATEVER THE GOVERNMENT CHOSE TO DO OR NOT TO DO.

APAPUN PILIHAN PEMERINTAH UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN.

JAMES E. ANDERSON:

PUBLIC POLICY ARE THOSE POLICIES DEVELOPED BY GOV.BODIES & OFFICIALS.

K.P. ADALAH KEBIJAKAN YG. DIKEMBANGKAN OLEH BADAN-BADAN & PEJABAT-PEJABAT PEMERINTAH.

DAVID EASTON:

PUBLIC POLICY IS THE AUTHORITATIVE ALLOCATION OF VALUES FOR THE WHOLE SOCIETY.

K.P. ADALAH PENGALOKASIAN NILAI-NILAI SECARA SAH KEPADA SELURUH ANGGOTA MASYARAKAT.

CATATAN:

PIDATO & PERNYATAAN KEBIJAKAN (POLICY STATEMENT) PEJABAT PEM./NEGARA DAPAT MERUPAKAN K.P.

(MUDRICK K. ET AL)

KESIMPULAN:

- K.P. DIBUAT OLEH PEMERINTAH YG. BERUPA TINDAKAN-TINDAKAN PEMERINTAH.
- K.P. BAIK UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU ITU MEMPUNYAI TUJUAN TERTENTU.
- K.P. DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT.

B. JENIS-JENIS KEBIJAKAN PUBLIK

1. SUBSTANTIVE & PROCEDURAL POLICIES.
2. DISTRIBUTIVE, REDISTRIBUTIVE & REGULATORY POLICIES.
3. MATERIAL POLICIES.
4. PUBLIC GOODS & PRIVATE GOODS POLICIES.

SUBSTANTIVE POLICY:

KEBIJAKAN YG. DILIHAT DARI SUBSTANSI MASALAH YG. DIHADAPI.

PROCEDURAL POLICY:

KEBIJAKAN YG. DILIHAT DARI PIHAK-PIHAK YG. TERLIBAT DALAM PERUMUSANNYA (POLICY STAKE HOLDERS).

DISTRIBUTIVE POLICY:

- PEMBERIAN PELAYANAN/ KEUNTUNAN KEPADA INDIVIDU, KELOMPOK, PERUSAHAAN.

REDISTRIBUTIVE POLICY:

PEMINDAHAN ALOKASI KEKAYAAN PEMILIKAN HAK.

REGULATORY POLICY:

PEMBATASAN/ PELARANGAN TERHADAP PERBUATAN/ TINDAKAN.

PUBLIC GOODS POLICY:

PENYEDIAAN BARANG/ PELAYANAN UNTUK KEPENTINGAN ORANG BANYAK.

PRIVATE GOODS POLICY:

PENYEDIAAN BARANG/ PELAYANAN UNTUK KEPENTINGAN PERORANGAN DENGAN IMBALAN TERTENTU.

C. TINGKAT-TINGKAT KEBIJAKAN PUBLIK:

LINGKUP NASIONAL:

- KEBIJAKAN NASIONAL
- KEBIJAKAN UMUM
- KEBIJAKAN PELAKSANAAN

LINGKUP DAERAH:

- KEBIJAKAN UMUM
- KEBIJAKAN PELAKSANAAN.

LINGKUP NASIONAL

KEBIJAKAN NASIONAL:

- BERSIFAT FUNDAMENTAL & STRATEGIS.
- UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.
- WEWENANG: *MPR, PRESIDEN, DPR.*
- BENTUK: *UUD, TAP MPR, UU, PERPU.*

KEBIJAKAN UMUM:

- MENYELURUH, NASIONAL
- PELAKSANAAN UUD, TAP MPR, UU,
- WEWENANG: *PRESIDEN*
- BENTUK: *PP, KEPRES, INPRES.*

KEBIJAKAN PELAKSANAAN

- MERUPAKAN PENJABARAN DARI KEBIJAKAN UMUM.
- SEBAGAI STRATEGI PELAKSANAAN DI BIDANG TERTENTU.
- YG. BERWEWENANG: MENTERI, PEJABAT SETINGKAT MENTERI & PIMPINAN LPND.
- BENTUK: * PERATURAN MENTERI/ PEJABAT SETINGKAT MENTERI/ PIMP. LPND.
* KEPUTUSAN/ INSTRUKSI MENTERI/ PEJABAT SETINGKAT MENTERI/ PIMP. LPND.

LINGKUP WILAYAH/ DAERAH

KEBIJAKAN UMUM

- MERUPAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.
- MERUPAKAN PELAKSANAAN ASAS DESENTRALISASI
- YANG BERWEWENANG:
 - GUBERNUR, DPRD PROVINSI
 - BUPATI/ WALIKOTA/ DPRD KABUPATEN/ KOTA.
 - BENTUK: PERDA PROVINSI, PERDA KABUPATEN/ KOTA.

KEBIJAKAN PELAKSANAAN

- DESENTRALISASI: PELAKSANAAN PERDA.
- DEKONSENTRASI: PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL DI DAERAH (*OLEH APARAT PUSAT DI DAERAH*)
- TUGAS PERBANTUAN (MEDEBEWIND): PELAKSANAAN TUGAS PUSAT DI DAERAH (*OLEH APARAT DAERAH*).
- YANG BERWEWENANG: GUBERNUR; BUPATI/ WALIKOTA.
- BENTUK: * KEPUTUSAN GUBERNUR
 - * KEPUTUSAN BUPATI/ WALIKOTA
 - * INSTRUKSI GUBERNUR, BUPATI/ WALIKOTA (**KHUSUS UNTUK DESENTRALISASI & TUGAS PERBANTUAN**).

SISTEM, PROSES & SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK

SISTEM KEBIJAKAN PUBLIK

ADALAH KESELURUHAN POLA KELEMBAGAAN DALAM PEMBUATAN KEBJ. PUBLIK YG. MELIBATKAN HUBUNGAN DIANTARA 4 ELEMEN YAITU MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK, PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK, KEBIJAKAN PUBLIK, & DAMPAKNYA TERHADAP KELOMPOK SASARAN.

INPUT → PROSES → OUTPUT → IMPACT

INPUT: MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK (KEADAAN YG. MELATARBELAKANGI/ PERISTIWA YG. MENYEBABKAN TIMBULNYA MASALAH K.P.):

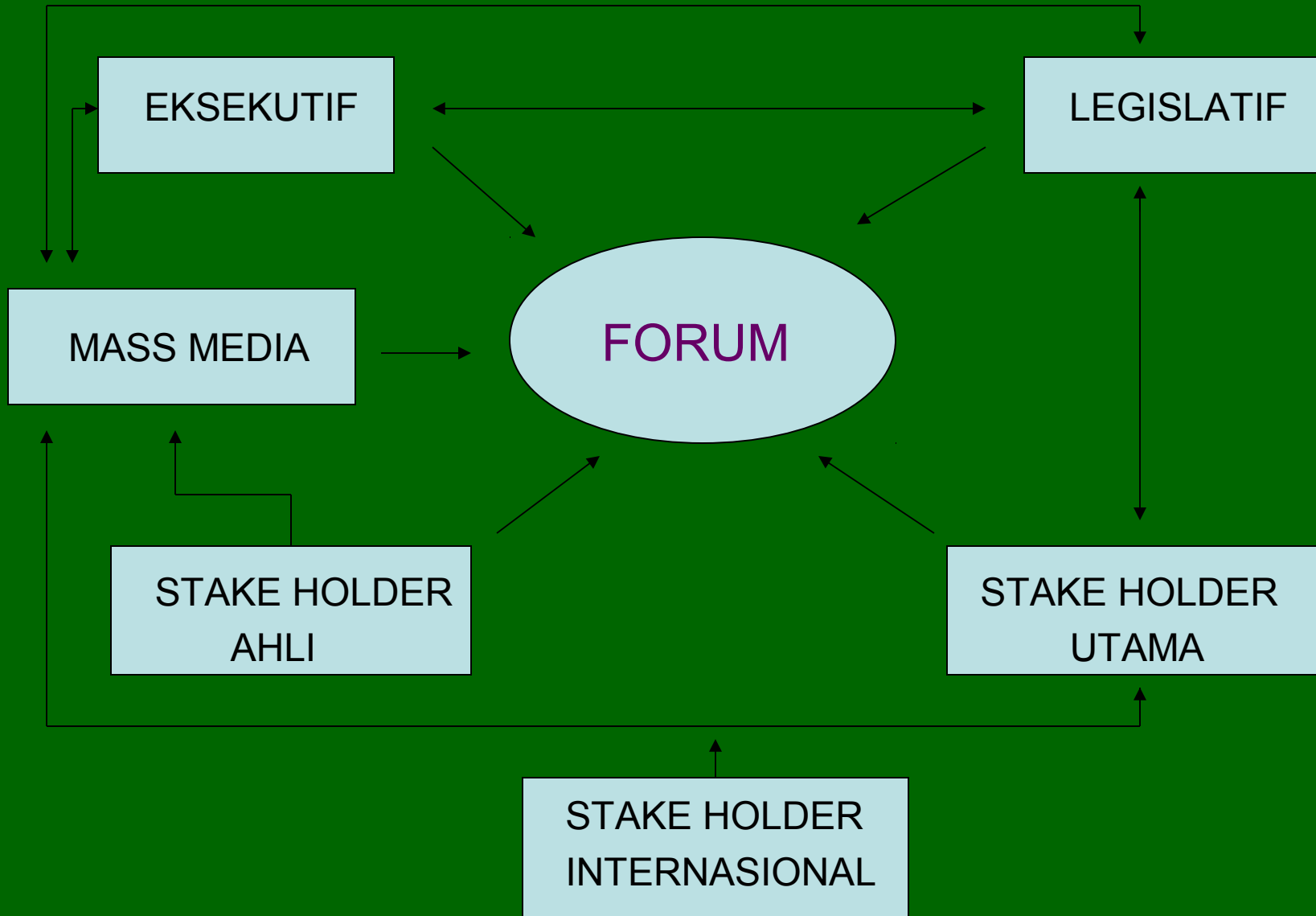
- * TUNTUTAN, KEINGINAN, TANTANGAN, PELUANG.
- * MASALAH YG. DITIMBULKAN OLEH K.P. BARU.

PROSES: PROSES PEMBUATAN K.P. BERSIFAT POLITIS, MELIBATKAN BERBAGAI KELOMPOK KEPENTINGAN YG. BERBEDA, ATAU BERTENTANGAN (STAKE HOLDER: PEJABAT PEMERINTAH, PEJABAT NEGARA, LEMBAGA PEMERINTAH, LINGK. MASY. TERMASUK PARPOL, PENGUSAHA).

OUTPUT: **KEBIJAKAN PUBLIK**, BERUPA TINDAKAN YG. DIMAKSUDKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH ATAU MENCAPAI TUJUAN TERTENTU: **PENEGAKAN HUKUM, KEAMANAN, PENDIDIKAN, PEMERATAAN, PENGENTASAN KEMISKINAN, KESEHATAN**

IMPACT: **DAMPAK K.P. TERHADAP KELOMPOK SASARAN**, YG. PERILAKU/ KEADAANNYA INGIN DIPENGARUHI/ DIUBAH.

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK



PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

TAHAP 1: PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK:

- PERUMUSAN MASALAH
- DIPILIHNYA ALTERNATIF
- REKOMENDASI PENGESAHAN OLEH PEJABAT YG BERWEWENANG.

TAHAP 2: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK:

MERUPAKAN PELAKSANAAN K.P. SETELAH DISAHKAN (*KEBIJAKAN LANGSUNG- DILAKUKAN OLEH PEM. SENDIRI, KEBIJAKAN TIDAK LANGSUNG- PEM. HANYA MENGATUR, KEBIJAKAN CAMPURAN*).

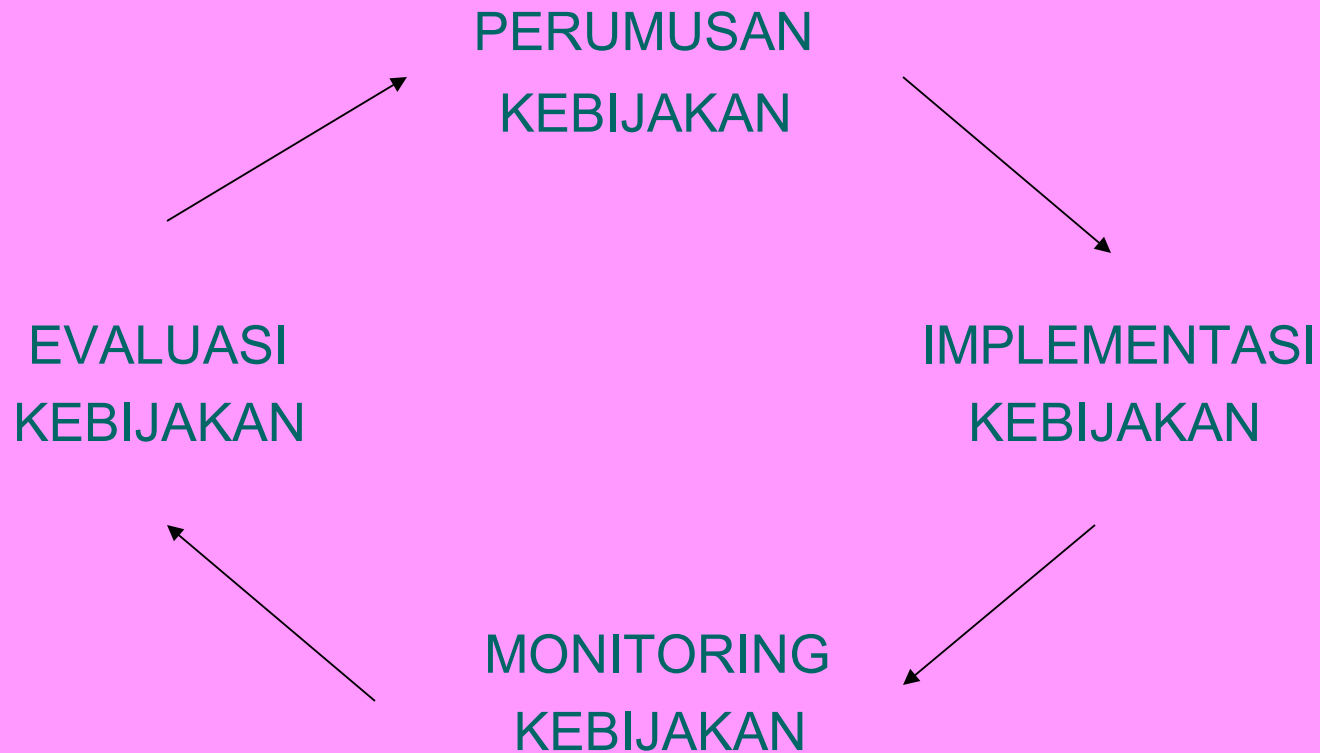
TAHAP 3: **MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK**
PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI K.P.
—→ **UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI**
PENCAPAIAN TUJUAN K.P.

TAHAP 4: **EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK**
MENILAI PERBEDAAN SEBELUM & SESUDAH
DIIMPLEMENTASIKANNYA K.P.

MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK: SARA,
KRIMINALITAS, INFLASI, ENERGI, POLUSI,
PENGANGGURAN, DLL.

SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK

PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DIGAMBARAKAN SEBAGAI SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK.



PERAN INFORMASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

DATA: FAKTA YG. SEDANG TIDAK DIGUNAKAN PADA PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN, DICATAT DAN DIARSIPKAN TANPA MAKSUD SEGERA DIAMBIL KEMBALI UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

INFORMASI: DATA YG. DIAMBIL KEMBALI, DIOLAH & DIGUNAKAN UNTUK MEMBERI DUKUNGAN KETERANGAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

SYARAT-SYARAT INFORMASI YANG BAIK

- KETERSEDIAAN (AVAILABILITY)
- MUDAH DIPAHAMI
- RELEVAN DENGAN PERMASALAHAN
- BERMANFAAT
- TEPAT WAKTU
- ANDAL (RELIABLE): SUMBERNYA
- AKURAT TANPA SALAH, JELAS, TEPAT
- KONSISTEN: TIDAK KONTRADIKSI.

PENTINGNYA INFORMASI DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN:

- UNTUK MEMECAHKAN PERMASALAHAN DIPERLUKAN INFORMASI.
- DALAM PERUMUSAN/ PEMBUATAN KEBIJAKAN DIPERLUKAN INFORMASI.



INFORMASI YANG RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN

DALAM PENYEDIAAN INFORMASI, METODOLOGI DALAM ANALISIS KEBIJAKAN DAPAT MEMBERIKAN INFORMASI DENGAN MENJAWAB 5 PERTANYAAN.

- MASALAH APA YG. DIHADAPI → **MASALAH KEBIJAKAN**
- KEBIJAKAN-KEBIJAKAN APA YG. TELAH DIBUAT UNTUK MEMECAHKAN MASALAH SEKARANG/ MASA LALU, DAN HASIL APA YG. TELAH DICAPAI → **HASIL KEBIJAKAN**
- BAGAIMANA NILAI (TUJUAN YG. DIINGINKAN) DARI HASIL KEBIJAKAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH → **KINERJA KEBJ.**
- ALTERNATIF-ALTERNATIF KEBIJAKAN APA YG. TERSEDIA UNTUK MEMECAHKAN MASALAH → **MASA DEPAN KEBJ.**
- ALTERNATIF-ALTERNATIF TINDAKAN APA YG. PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH → **TINDAKAN KEBJ.**

(WILLIAM N. DUNN)

AGENDA SETTING

- MERUPAKAN SUATU TAHAP SEBELUM PERUMUSAN KEBIJAKAN DILAKUKAN → BAGAIMANA ISU-ISU MUNCUL PADA AGENDA PEMERINTAH YG. PERLU DITINDAKLANJUTI BERUPA TINDAKAN-TINDAKAN PEMERINTAH.
- ADALAH PENGENALAN MASALAH YG. DIHADAPI OLEH INSTANSI PEMERINTAH.
- PENGERTIAN AGENDA: SUATU DAFTAR SUBJEK ATAU MASALAH DIMANA PARA PEJABAT PEMERINTAH & MASYARAKAT DILUAR PEMERINTAH MEMBERIKAN PERHATIAN.

AGENDA DIBEDAKAN MENJADI 2:

- SISTEMIK AGENDA (AGENDA SISTEMIK)
- GOVERNMENTAL AGENDA (AGENDA PEMERINTAH)

AGENDA SISTEMIK

- TERDIRI ATAS ISU-ISU YG. DIPANDANG SECARA UMUM OLEH ANGGOTA MASYARAKAT POLITIK SEBAGAI *PANTAS MENDAPAT PERHATIAN DARI MASYARAKAT.*
- MENCAKUP MASALAH-MASALAH YG. BERADA DALAM KEWENANGAN SAH DARI SETIAP TINGKAT PEMERINTAH.

TIGA PRASYARAT AGAR ISU KEBIJAKAN DAPAT MASUK DALAM AGENDA SISTEMIK:

- MEMPEROLEH PERHATIAN YG. LUAS MINIMAL MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT.
- ADANYA PERSEPSI/ PANDANGAN MASYARAKAT BAHWA PERLU DILAKUKAN TINDAKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH ITU.
- ADANYA PERSEPSI YG. SAMA DARI MASYARAKAT BAHWA MASALAH ITU MERUPAKAN KEWAJIBAN & TANGGUNGJAWAB YG. SAH DARI PEMERINTAH UNTUK MEMECAHKAN.

AGENDA PEMERINTAH

SERANGKAIAN MASALAH YG. SECARA EKSPLISIT MEMERLUKAN PERTIMBANGAN YG. AKTIF & SERIUS DARI PEMBUAT KEBIJAKAN YG. SAH.

AGAR PERMASALAHAN DAPAT MASUK KEDALAM AGENDA PEMERINTAH:

- TERDAPAT ANCAMAN TERHADAP KESEIMBANGAN ANTAR KELOMPOK.
- PEMIMPIN POLITIK DPT. MENJADI FAKTOR PENTING DALAM PENYUS. AGENDA PEMERINTAH.
- TIMBULNYA KRISIS ATAU PERISTIWA LUAR BIASA.
- ADANYA GERAKAN-GERAKAN PROTES.

IMPLEMENTASI, MONITORING & EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

- ADALAH SUATU PROSES DIMANA KEBIJAKAN-KEBIJAKAN ATAU PROGRAM-PROGRAM DILAKSANAKAN.
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERUPAKAN PENERJEMAHAN RENCANA-RENCANA KEDALAM PELAKSANAAN.
- IMPLEMENASI KEBIJAKAN DIANGGAP TIDAK BERMASALAH.
- SEKALI KEBIJAKAN DIBUAT AKAN MUDAH DILAKSANAKAN. (ANGGAPAN)

IMPLEMENTATION GAP

- DALAM SUATU PROSES KEBIJAKAN AKAN TERBUKA KEMUNGKINAN TERJADINYA PERBEDAAN ANTARA APA YG. DIHARAPKAN OLEH PEMBUAT KEBIJAKAN DENGAN KENYATAAN YG. DICAPAI.

IMPLEMENTATION CAPACITY

- KEMAMPUAN ORGANISASI UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN AGAR TUJUAN YG. TELAH DITETAPKAN DALAM KEBIJAKAN DAPAT DICAPAI.

2 KATEGORI KEGAGALAN KEBIJAKAN PUBLIK:

- NON IMPLEMENTATION (TIDAK DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN)

CONTOH: PAJAK 5% UNTUK PENUKARAN Rp. KE US \$.

- UNSUCCESSFUL IMPLEMENTATION (IMPLEMENTASI YG. KURANG BERHASIL)

CONTOH: RETRIBUSI PESAWAT TV.

MONITORING KEBIJAKAN PUBLIK

ADALAH PROSES KEGIATAN PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YG. MELIPUTI KETERKAITAN ANTARA IMPLEMENTASI & HASIL-HASILNYA.

TUJUAN MONITORING:

- COMPLIANCE
- AUDITING
- ACCOUNTING
- EXPLANATION.

- **COMPLIANCE:**

APAKAH PETUGAS TAAT PADA STANDAR & PROSEDUR SESUAI PERATURAN.

- **AUDITING**

APAKAH DANA & PELAYANAN YG.DIALOKASIKAN MENCAPAI KELOMPOK.

- **ACCOUNTING**

PERUBAHAN APA YG. TERJADI AKIBAT DARI KEBIJAKAN.

- **EXPLANATION**

MENGAPA HASIL DARI KEBIJAKAN BERBEDA DENGAN TUJUANNYA.

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

- ADALAH PROSES PENGKAJIAN SECARA SISTEMATIK, OBJEKTIF & EMPIRIS TENTANG AKIBAT –AKIBAT DARI KEBIJAKAN & PROGRAM YG. DIIMPLEMENTASIKAN, DILIHAT DARI TUJUAN-TUJUAN YG. DIHARAPKAN TERCAPAI.
- MERUPAKAN KEGIATAN POLITIS.
- MELIBATKAN BIROKRAT & POLITISI DALAM PEMERINTAH.
- MELIBATKAN ANGGOTA MASYARAKAT DARI LUAR PEMERINTAH.
- JARANG DILAKUKAN, KURANG PUBLIKASI.

BENTUK-BENTUK EVALUASI KEBIJAKAN

- **EVALUASI ADMINISTRATIF:**

- * DIBATASI PADA PENGKAJIAN TENTANG EFISIENSI PENYAMPAIAN PELAYANAN PEMERINTAH.

- * PENENTUAN APAKAH PENGGUNAAN DANA OLEH PEMERINTAH SESUAI DENGAN TUJUAN YG. TELAH DITENTUKAN.

BENTUK EVALUASI ADMINISTRATIF:

- EFFORT EVALUATION
- PERFORMANCE EVALUATION
- EFFECTIVENESS EVALUATION
- PROCESS EVALUATION
- JUDICIAL EVALUATION
- POLITICAL EVALUATION

- **EFFORT EVALUATION:** UNTUK MENGUKUR KUANTITAS INPUT PROGRAM/ KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN.
INPUT BERUPA PERSONIL, RUANG KANTOR, KOMUNIKASI, TRANSPORTASI DLL. DIHITUNG BERDASARKAN BIAYA YG. DIGUNAKAN.
- **PERFORMANCE EVALUATION:** MENGENAL OUTPUT PROGRAM.
CONTOH: OUTPUT RUMAH SAKIT MIS. TEMPAT TIDUR YG. TERSEDIA, JUMLAH PASIEN DLL.
- **EFFECTIVENESS EVALUATION:** MENILAI APAKAH PROGRAM- PROGRAM TELAH DILAKSANAKAN, DAN KEMUDIAN DIADAKAN PERBANDINGAN KESESUAIAN ANTARA PELAKSANAAN PROGRAM DENGAN TUJUAN KEBIJAKAN.

- **PROCESS EVALUATION:**
MENGKAJI PERATURAN-
PERATURAN & PROSEDUR
OPERASI YG. DIGUNAKAN
DALAM PENYAMPAIAN
PROGRAM.
- **JUDICIAL EVALUATION:**
MENGKAJI APAKAH KEBIJAKAN
YG. DIBUAT TELAH SESUAI
DENGAN PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN,
**APAKAH TIDAK MELANGGAR
HAM, & HAK-HAK INDIVIDU.**
- **POLITICAL EVALUATION:**
EVALUASI POLITIS MASUK
DALAM PROSES KEBIJAKAN
HANYA PADA WAKTU- WAKTU
TERTENTU, MIS. PEMILU.



ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

- DIMENSI KEBIJAKAN PUBLIK

PROSES KEBIJAKAN: MENGENAL PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN: *IDENTIFIKASI, PERUMUSAN MASALAH, IMPLEMENTASI, MONITORING, EVALUASI KEBIJAKAN.*

ANALISIS KEBIJAKAN: PENERAPAN METODE & TEKNIK ANALISIS YG. BERSIFAT MULTI DISIPLIN DALAM PROSES KEBIJAKAN.

PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH **MULTI DISIPLIN.**

- **PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK**

- **WILLIAM N. DUNN: A.K.P. ADALAH ILMU SOSIAL TERAPAN YG.MENGGUNAKAN BERBAGAI MACAM METODOLOGI PENELITIAN & ARGUMEN UNTUK MENGHASILKAN & MENTRANSFORMASIKAN INFORMASI YG. RELEVAN DENGAN KEBIJAKAN YG. DIGUNAKAN DALAM LINGKUNGAN POL. TERTENTU UNTUK MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH KEBIJAKAN.**

- **E.S. QUADE**

A.K.P. ADALAH SUATU BENTUK PENELITIAN TERAPAN YG. DILAKUKAN UNTUK MEMAHAMI SECARA MENDALAM BERBAGAI MASALAH SOSIAL GUNA MENDAPATKAN PEMECAHAN YG. LEBIH BAIK.

- **STUART S. NAGEL**

A.K.P. ADALAH PENENTUAN DALAM RANGKA HUBUNGAN ANTARA BERBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN & TUJUAN-TUJUAN KEBIJAKAN MANAKAH DIANTARA BERBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN, KEPUTUSAN, ATAU CARA-CARA LAINNYA YG. TERBAIK UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU.

INTI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

- PENELITIAN UNTUK MENDAPATKAN DATA & INFORMASI.
- Mencari & Mengkaji Berbagai Alternatif Pemecahan Masalah Atau Pencapaian Tujuan.
- Dilaksanakan Secara Multi Disiplin.

FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YG. BERPENGARUH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN

- **FAKTOR POLITIK:** PERLUNYA DUKUNGAN DARI BERBAGAI AKTOR KEBIJAKAN.
- **FAKTOR EKONOMI:** BILA PERLU DANA BESAR & BERPENGARUH PADA SITUASI EKONOMI NEGARA.
- **FAKTOR ADMINISTRASI/ ORGANISASI:** DUKUNGAN UNTUK PELAKSANA.
- **FAKTOR TEKNOLOGI:** APAKAH TEKNOLOGI YG. ADA DAPAT MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.

- **FAKTOR SOSIAL, AGAMA, BUDAYA:** AGAR KEBIJAKAN TIDAK MENIMBULKAN BENTURAN SOSIAL, BUDAYA & AGAMA (SARA)
- **FAKTOR HANKAM:** AGAR KEBIJAKAN TIDAK MENGGANGGU STABILITAS HANKAM NEGARA.



ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

- ANALISIS MENGENAI PERUMUSAN K.P.
 - MENGADAKAN PENGKAJIAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA BADAN-BADAN EKSEKUTIF & LEGISLATIF SELAMA PROSES PENYUSUNAN.
 - ANALISIS INI MENCOBA MENJAWAB PERTANYAAN:
 - BAGAIMANA KEBIJAKAN DIBUAT.
 - MENGAPA DIPILIH ALTERNATIF A BUKAN B.
 - SIAPA TERLIBAT DALAM PERUMUSAN.
 - SIAPA YG.PALING DOMINAN.
 - MENGAPA IA PALING DOMINAN.

ANALISIS MENGENAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

- MEMPELAJARI SEBAB-SEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN K.P.
- FAKTOR-FAKTOR YG. MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI K.P.
- PERTANYAAN YG. HENDAK DIJAWAB:
 - BAGAIMANA CARA KEBIJ. DIIMPLEMENTASIKAN.
 - SIAPA YG. TERLIBAT DALAM IMPLEMENTASI.
 - BAGAIMANA INTERAKSI PARA PELAKU IMPLEMENTASI.
 - SIAPA YG. DIBERI WEWENANG SECARA FORMAL & SIAPA YG. LEBIH BERKUASA SECARA INFORMAL.
 - BAGAIMANA CARA KERJA BIROKRAT.
 - BAGAIMANA CARA PENGAWASAN & KOORDINASI.
 - BAGAIMANA TANGGAPANN KELOMPOK SASARAN.

ANALISIS MENGENAI EVALUASI KEBIJAKAN

- MENGENAL AKIBAT-AKIBAT KEBIJAKAN ATAU MENCARI JAWABAN APA YG. TERJADI AKIBAT DARI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.
- DISEBUT JUGA ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN, MENGENAL AKIBAT-AKIBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN.



PUBLIC PROBLEM: MASALAH-MASALAH YG.
MEMPUNYAI AKIBAT YG. LUAS, TERMASUK
AKIBAT-AKIBAT YG. MENGENAI ORANG-
ORANG YG. TAK LANGSUNG TERLIBAT.

PRIVATE PROBLEM: MASALAH-MASALAH YG.
MEMPUNYAI AKIBAT TERBATAS, HANYA
MENYANGKUT SEJUMLAH KECIL ORANG
YG. TERLIBAT SECARA LANGSUNG.

**KRITERIA UNTUK MENGUKUR/ MENILAI KELAYAKAN
TIAP ALTERNATIF —————> LIHAT FAKTOR-FAKTOR
STRATEGIS YG. BERPENGARUH DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN.**

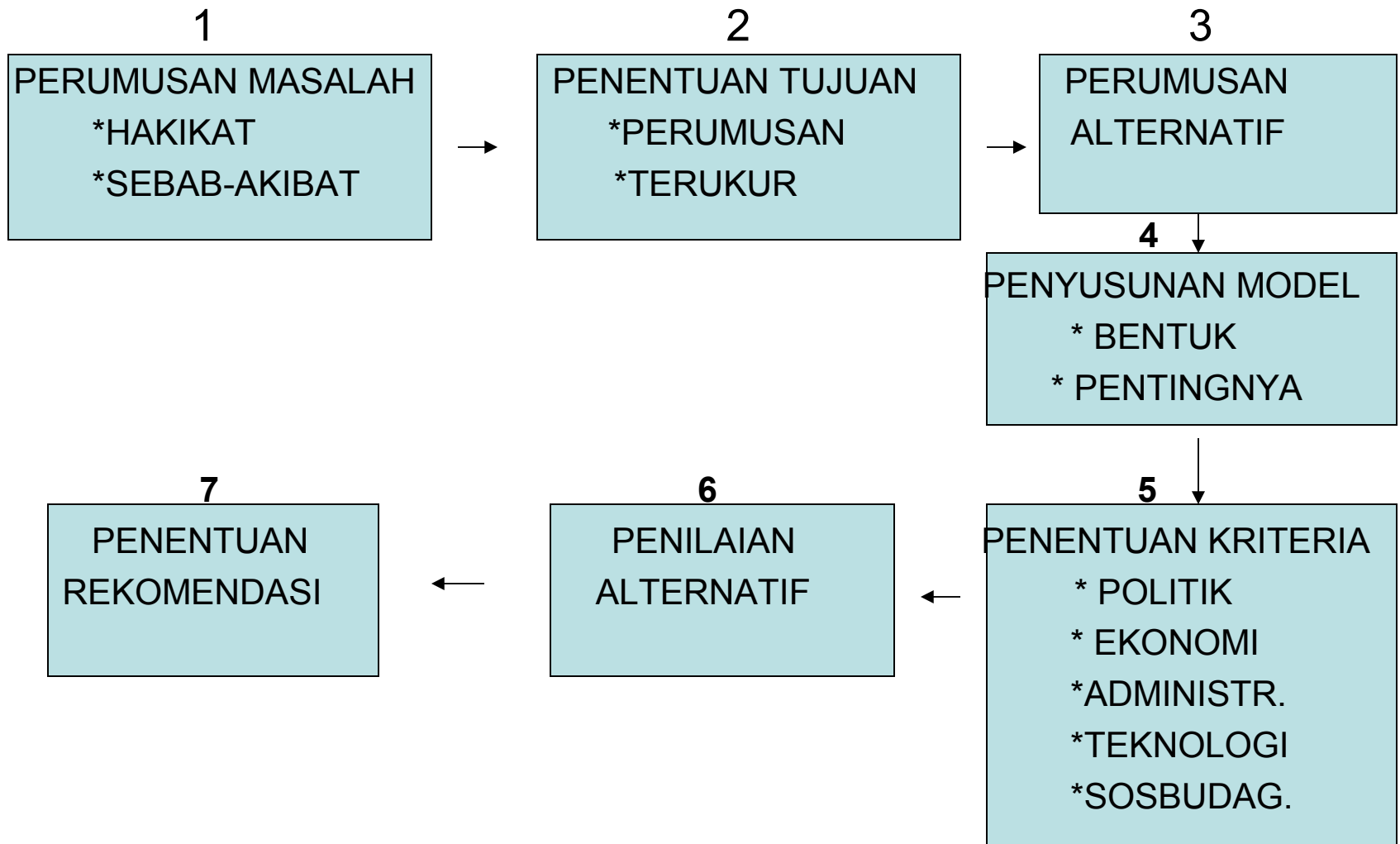
MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK:

KEBUTUHAN & NILAI YG. BELUM TERPENUHI ATAU KESEMPATAN UNTUK MENGADAKAN PERBAIKAN YG. HANYA DAPAT DILAKUKAN MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK.

MERUMUSKAN PERMASALAHAN KEBIJAKAN

- PIKIRKAN MASALAH YG. HENDAK DIATASI.
- TETAPKAN BATASAN PERMASALAHAN.
- KUMPULKAN DATA & INFORMASI.
- IDENTIFIKASIKAN PAYUNG KEBIJAKAN.
- TUNJUKKAN BIAYA & MANFAAT.
- TINJAU KEMBALI RUMUSAN MASALAH YG. DISUSUN.

• PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK



PERUMUSAN MASALAH

- Masalah *meningkatnya urbanisasi ke Jakarta.*
- Penyebabnya:
 - Kemudahan bagi orang untuk ke Jakarta
 - Daerah2 tertentu belum terbangun fasilitas yang memadai
 - Investasi Jakarta yang tumbuh cepat
 - Transportasi ke wilayah lain yang belum menarik.
- Susun dalam pohon masalah.

CONTOH: MASALAH MENINGKATNYA URBANISASI KE JAKARTA

- **ADA 4 ALTERNATIF PEMECAHAN.**

1. MEMBATASI KEMUNGKINAN TINGGAL DI JAKARTA.
2. MEMBANGUN FASILITAS DI DAERAH.
3. MEMBATASI PERTAMBAHAN INVESTASI DI JAKARTA.
4. MEMBANGUN TRANSPORTASI KE WILAYAH LAIN.

DENGAN PRIORITAS **PENINGKATAN DAYA SAING** MAKA
KRITERIA DIBERI BOBOT:

- KRITERIA POLITIK; 3
- KRITERIA EKONOMI: 5
- KRITERIA KEUANGAN: 2
- KRITERIA ADMINISTRASI: 3
- KRITERIA EFEKTIFITAS: 4

No.	Kriteria						
	Alt. Kebijk	Pol	Ek	Keu	Adm	Eft	Juml
1.	Membatasi tinggal di Jkt.	1	2	5	1	3	12
2.	Membangun Fas.Daerah	5	5	1	2	4	17
3.	Membatasi Pemb. Jkt.	1	1	2	2	3	9
4.	Membangun Transp. Ke Daerah lain	5	5	1	2	3	16

Tabel 1: PENILAIAN ALTERNATIF DITINJAU DARI MASING- MASING KRITERIA

No.	Kriteria						
	Alt. Kebijk	Pol	Ek	Keu	Adm	Eft	Juml
1.	Membatasi tinggal di Jkt.	1X3	2X5	5X2	1X3	3X4	38
2.	Membangun Fas.Daerah	5X3	5X5	1X2	2X3	4X4	64
3.	Membatasi Pemb. Jkt.	1X3	1X5	2X2	2X3	3X4	30
4.	Membangun Transp. Ke Daerah lain	5X3	5X5	1X2	2X3	3X4	60

Tabel 2: BOBOT TERTIMBANG PENILAIAN ALTERNATIF

